

PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN

Dedeng Yoesoef Maolani¹⁾, Amalia Purnama Sari²⁾, Arindhini Amalia³⁾, Cyntia Octavelia Sholeha⁴⁾.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ^{1,2,3,4)}

Email: *dedeng@uinsgd¹⁾, amaliapurnamasari.892@gmail.com²⁾, arindhini07@mail.com³⁾, cyntiaos123@gmail.com⁴⁾.*

Abstrak

Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah seperti prosedur kerja yang berliku-liku, beban kerja tidak merata, lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, perilaku korupsi, kondisi itu digambarkan sebagai birokrasi sakit atau patologi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan berbagai macam praktik patologi birokrasi di Indonesia serta pencegahannya agar bisa menciptakan birokrasi yang efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjalanan birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi yaitu dengan mengubah posisi dan peran birokrasi yang selama ini dilaksanakan. Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan birokrasi yang efisien.

Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pencegahan Patologi Birokrasi, Birokrasi Efisien.

Abstract

Bureaucracy is identical with the impression of a long and convoluted process, as a result of which the bureaucracy gets a negative image. The reality experienced in the government bureaucracy, such as tortuous work procedures, uneven workload, sluggishness, inefficient, rigid, lack of transparency, corrupt behavior, these conditions are described as sick bureaucracy or bureaucratic pathology. This study aims to determine the conditions and various kinds of bureaucratic pathology practices in Indonesia and their prevention in order to create an efficient bureaucracy. The method used in this research is a qualitative approach with literature study techniques. The results of the study indicate that the journey of the bureaucracy in Indonesia is closely related to the nation's culture and is influenced by existing cultural problems. Culture and habits that are difficult to change because they are closely related to aspects of morality, this is the beginning of the emergence of symptoms of bureaucratic pathology. The culture of extortion, bribery, slow service, complicated procedures, corruption, collusion and nepotism has become a habit for the Indonesian people. Therefore, efforts can be made to prevent bureaucratic pathology, namely by changing the position and role of the bureaucracy that has been implemented so far.

In addition, applying the principles of good governance can prevent bureaucratic pathology, especially in corruption, collusion, and nepotism to create an efficient bureaucracy.

Keywords: Bureaucratic Pathology, Bureaucratic Pathology Prevention, Efficient Bureaucracy

A. PENDAHULUAN

Manajemen profesional pelayanan pendekatan manajemen baru, baik secara teori publik harus lebih berorientasi pada tujuan maupun praktis (Usman, 2011). Apalagi paradigma pemerintahan yang didasarkan pada Permasalahan Birokrasi Publik Indonesia Bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance and clean government*) (Lukman, 2016). Birokrasi merupakan instrumen penting didalam masyarakat yang ada kehadirannya. Dalam pasal 1 UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public pengertian pelayanan public adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Birokrasi diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan. Adanya kenyataan sehari-hari yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah seperti prosedur kerja yang berbelik-belik, beban kerja tidak merata, lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, perilaku korupsi masih mewarnai perilaku birokrasi, kondisi itu digambarkan sebagai birokrasi sakit atau patologi birokrasi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mu'min Ma'ruf tentang patologi birokrasi menyatakan bahwa patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama. Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai "eksekutor" kekuasaan birokrasi sangat mudah terbuai dan tergoda untuk melakukan "*abuse of power*". Untuk itu dalam menghadapi berbagai gejala empirik patologi dalam birokrasi, sudah saatnya diupayakan agar birokrasi memiliki daya tahan yang semakin tinggi terhadap berbagai penyakit yang menyeranginya, juga reformasi birokrasi harus dilakukan secara radikal dan komprehensif, karena pada dasarnya patologi birokrasi yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan para penegak hukum para politisi dan yang lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aris Tri Haryanto dengan judul upaya menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel membahas bahwa untuk menciptakan suatu organisasi agar efisien, berbagai paradigma muncul mulai dari era pasca 1980 dengan *Collaborative Individu, Reinventing Government dan Banishing Bureaucracy* semuanya bermuara agar organisasi publik atau birokrasi bisa menjadi kompetitif dan memainkan peran yang tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku dalam mekanisme pasar yang sangat kompetitif. Untuk itu reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada struktur, proses atau prosedur saja tetapi juga reformasi moral dan sikap para birokrat. Tanpa ada kesadaran untuk mengurangi atau menghapus berbagai bentuk patologi birokrasi, maka reformasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel hanya akan sebatas pernyataan belaka.

Istilah patologi birokrasi sudah lama digunakan oleh ilmuwan Administrasi Publik dalam menggambarkan sebagai penyakit yang ada di birokrasi, seperti Gerald E Caiden (1991) dan Barry

Bozeman (2000) dari Amerika Serikat, Sondang P. Siagian (1994) dari Indonesia. Pada awalnya istilah patologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun belakangan istilah ini dikenal dalam birokrasi. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi, Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus” (Teruna, 2007).

Dalam paradigma Actonian dinyatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolut pasti korup) secara implisit juga menjelaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya (Ismail, 2009).

Selaras dengan semangat otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, maka sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan publik terhadap masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat, selain itu juga dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui.

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik mengumpulkan data berupa penelitian pustaka (*library research*), dimana data yang dicari dan ditemukan objek utamanya melalui kajian pustaka dari buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan pembahasan (Lexy, 2002).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Patologi Birokrasi dan Penyebabnya

Pemerintah dan seluruh aparatur yang dikenal dengan birokrasi memiliki peranan yang cenderung dominan dalam menentukan kebijakan, sehingga birokrasi memiliki peran dalam menentukan proses administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam menjalankan peranannya tersebut masih terjadi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perilaku para aparatur birokrasi, hambatan tersebut dalam birokrasi dinamakan sebagai patologi birokrasi. Istilah patologi birokrasi digunakan oleh ilmuwan Administrasi Publik dalam menginterpretasikan bentuk penyakit di tubuh birokrasi. Patologi birokrasi sendiri merupakan penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Patologi birokrasi diidentifikasi oleh Siagian (1999) dalam lima kategori yaitu patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, patologi yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, dan patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Upaya mengatasi patologi birokrasi pada hakikatnya yaitu dengan memberikan pelayanan utama kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari kewajiban aparatur negara. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik sepenuhnya belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan berbagai hambatan-hambatan, sehingga belum terwujudnya birokrasi yang efisien bagi masyarakat. Birokrasi beserta para aparaturnya masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan, dimana penyelenggara pelayanan masih beranggapan bahwa aparatur birokrat sebagai penguasa bukan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara harus memiliki pemahaman mengenai patologi birokrasi agar dapat dicegah ataupun diobati sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat terwujud.

Adapun dua faktor yang mempengaruhi terjadinya patologi birokrasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam faktor internal yang sangat berperan yaitu morality yang melekat dalam diri masing-masing aparatur negara, kepemilikan moral yang ada pada diri masing-masing aparatur akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Faktor eksternal munculnya patologi birokrasi antara lain adalah unsur budaya organisasi, sistem atau prosedur, pelaksanaan sanksi atau hukum, dan kepemimpinan. Adapun penyebab lainnya baik oleh pihak masyarakat maupun birokrat diantaranya tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa berfikir, kebingungan, sogok, mutu hasil pekerjaan rendah, kedangkalan, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, sikap ragu-ragu, bekerja tidak produktif, ketidakratahan, dan stagnasi (2017). Fred W. Riggs (1996) menyebutkan patologi birokrasi di negara-negara berkembang terjadi karena intervensi pejabat negara yang seharusnya tidak dilakukan, intervensi pejabat negara yang berlebihan menyebabkan birokrasi gagal melayani kepentingan umum sebagaimana mestinya.

Jenis-Jenis Patologi Birokrasi

Istilah patologi umumnya digunakan dalam akademis di lingkungan Administrasi Publik untuk menjelaskan berbagai praktik penyimpangan dalam birokrasi seperti paternalistik, prosedur yang berlebihan, pembengkakan birokrasi, pembengkakan anggaran, dan fragmentasi birokrasi (Dwiyanto, 2011) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Birokrasi Paternalistik Perilaku birokrasi paternalistik adalah hasil dari proses interaksi yang intensif antara struktur birokrasi yang hirarkis dan budaya paternalistik yang berkembang dalam masyarakat.
2. Prosedur yang Berlebihan Prosedur yang berlebihan merupakan bentuk penyakit birokrasi publik yang menonjol di berbagai instansi pelayanan publik di Indonesia. Birokrasi publik bukan hanya mengembangkan prosedur yang rigid dan kompleks, tetapi juga mengembangkan ketaatan terhadap prosedur secara berlebihan.
3. Pembengkakan Birokrasi Menurut Dwiyanto (2011) terdapat dua cara yang biasanya ditempuh untuk membengkakkan birokrasi. Cara pertama dilakukan dengan memperluas misi birokrasi, bagaimana pemerintah membentuk satuan birokrasi tertentu yang biasanya pemerintah Memiliki gambaran yang jelas mengenai misi yang akan diemban oleh satuan birokrasi tersebut. Cara kedua untuk membengkakkan birokrasi adalah dengan melakukan kegiatan diluar misinya, tindakan ini banyak dilakukan oleh satuan-satuan birokrasi baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Hal ini disebabkan oleh cara pengalokasian anggaran yang berorientasi pada input sehingga birokrasi dan para pejabatnya ingin memperoleh anggaran besar dengan cara mudah untuk memperbesar input adalah dengan menciptakan banyak kegiatan.

3. Pembengkakkan Anggaran. Hal ini sering terjadi karena semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan maka semakin besar pula peluang untuk memark-up anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebihi-lebihkan anggaran, dan cenderung birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input.
4. Fragmentasi Birokrasi Fragmentasi adalah pengkotak-kotakan birokrasi ke dalam sejumlah satuan yang masing-masing memiliki peran tertentu. Dalam hal ini pembentukan satuan-satuan birokrasi didorong oleh keinginan untuk mengembangkan birokrasi yang mampu merespon permasalahan publik yang cenderung semakin kompleks.

Dalam buku yang berjudul “Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya” Siagian, (1988) patologi atau penyakit-penyakit birokrasi dapat dikategorikan ke dalam lima macam, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi (birokrat). Patologi jenis ini antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi, dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Patologi jenis ini antara lain ketidaktekapan dan ketidakcakapan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan *mark up* anggaran.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahan. Patologi jenis ini antara lain eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

Kondisi Patologi Birokrasi di Indonesia

Perjalanan birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut yang menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomenanya cenderung ke arah patronase, dimana timbulnya sebuah pola yang bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan atau yang disebut simbiosis mutualisme. Adanya sifat simbiosis mutualisme yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia dapat berakibat pada timbulnya sebuah hubungan atau relasi kekeluargaan di dalam tubuh pemerintahan. Realita ini mengesampingkan kualitas dan profesionalisme sehingga posisi-posisi utama tidak benar-benar ditempati oleh sumber daya manusia terbaik, melainkan oleh mereka yang memiliki hubungan meski tidak memiliki kemampuan. Pada akhirnya aparat tersebut sebagai seorang pelayan masyarakat tidak berkembang dengan baik, sehingga timbul patronase di mana aparat birokrat

hanya melayani kepentingan pribadi sehingga kepentingan publik menjadi terbengkalai. Hal ini menurut Blau dalam Bakti & Amin (2019), terjadi karena sudah terbangun relasi pertukaran sosial tidak seimbang sehingga klien hanya dapat mempersembahkan kepatuhan kepada patronase yang sudah berjasa meluluskannya sebagai ASN. Sehingga budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia, yang membuat usaha dalam menciptakan citra birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat merasakan dampak dari patologi birokrasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, hal ini menunjukkan kondisi empirik citra birokrasi yang sangat buruk dan negatif.

Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi agar Terciptanya Birokrasi Yang Efisien

Agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, maka birokrasi harus mengubah posisi dan peran yang selama ini dilaksanakan Miftah Thoha (1996). Dari suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang selalu berpendekatan kekuasaan dan monolog berubah ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis serta menuju cara kerja yang realistis pragmatis. Untuk mengatasi patologi birokrasi, seharusnya seluruh masyarakat saling membantu bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan bersama dengan sebaik-baiknya. Adapun solusi untuk mengatasi patologi birokrasi antara lain:

1. Perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, untuk itu kemampuan kognitif yang bersumber dari intelegensi dan pengalaman, skill atau keterampilan, yang didukung oleh sikap atau etitit merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia.
2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan dan jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara kepemimpinan yang adil dan kuat alat penegak hukum yang kuat dan bersih dari kepentingan politik, dan adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi. Di Indonesia salah satu kekuatan hukum dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam undang-undang ini mengatur tentang sistem manajemen ASN yaitu sistem merit. Dengan penerapan Undang-Undang ini birokrat dalam hal ASN diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar dan menerapkan sikap netralitas dalam segala bidang, dan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyeleweng dari

hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini.

Pembentukan *E-Government* diharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. Adapun alternatif pemecahan masalah patologi di tubuh birokrasi di Indonesia dalam membangun pelayanan publik yang efisien, responsif, akuntabel, dan transparan perlu ditetapkan kebijakan yang menjadi pedoman perilaku aparat birokrasi pemerintah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan berpola patron klien tidak memiliki standar pelayanan yang jelas atau pasti, dan tidak kreatif.
Perlu membuat peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang pelayanan publik yang memihak pada rakyat.
2. Dalam hubungan dengan struktur yang gemuk, kinerja berbelit-belit, perlu diharapkan restrukturisasi birokrasi pelayanan publik.
3. Untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme selain hal diatas diharapkan pemerintah menetapkan perundangan di bidang informatika (IT) sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan *e-government* agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparansi dan saling kontrol.
4. Setiap daerah provinsi dan kabupaten dituntut membuat Perda yang jelas mengatur secara seimbang hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
5. Setiap daerah diperlukan lembaga Ombudsman. Lembaga ini bisa berfungsi ingin mendudukkan warga pada pelayanan yang prima. Ombudsman harus diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan investigasi dan mencari penyelesaian yang adil terhadap perselisihan antara pengguna jasa dan penyelenggara dalam proses pelayanan publik.

Warsito Utomo, dalam artikelnya di Kedaulatan Rakyat bulan Mei 2001 memberikan saran untuk melakukan reformasi, antara lain:

1. Perlu mengembalikan atau mengingatkan kembali misi dan tujuan dari birokrasi, supaya apa yang dilakukan oleh para birokrat tepat pada sasaran.
2. Tidak hanya melaksanakan dengan konsisten, tetapi perlu memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan remunerasi, dimana pengaturan remunerasi akan memberikan motivasi yang positif.
3. Tuntutan birokrasi yang direformasi adalah birokrasi yang tidak terlalu terikat oleh *control*, orde dan prediction, tetapi lebih mengarah pada birokrasi yang terfokus kepada *alignment creativity* dan *empowerment*.
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralis yang masing-masing memiliki *value* dan tradisinya sendiri-sendiri yang dapat membentuk budaya organisasi atau budaya birokrasi. Sehingga reformasi birokrasi juga harus memperhatikan budaya atau keberadaan daerah.
5. Birokrat harus sadar bahwa mereka merupakan pelayanan publik, sehingga mereka dapat menciptakan organisasi untuk melayani masyarakat.

Merubah Patologi Birokrasi Melalui Prinsip *Good Governance*

Merubah patologi birokrasi melalui prinsip *Good Governance*, Mar'ie Muhammad Media Transparansi (1998) menyatakan bahwa *Good Governance* itu ada jika pembagian kekuasaan ada. Jadi ada *disperse of power*, bukan *concentrate of power*. *Good Governance* sama dengan *disperse*

of power, pembagian kekuasaan ditambah akuntabilitas publik dan transparansi publik. Jadi jika tidak ada prinsip ini, *Good Governance* perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. Semakin tinggi kualitas dari *Good Governance*, semakin rendah korupsi, sedangkan semakin rendah kualitas *Good Governance*, korupsi semakin tinggi. Dari pernyataan tersebut prinsip-prinsip *good governance* dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam hal korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Berikut uraian prinsip-prinsip *good governance* dalam merubah patologi birokrasi, antara lain:

Participation

Melalui prinsip masyarakat akan terlibat dalam pembuatan keputusan yang membangun atas dasar kebebasan berasal siasa dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, sehingga dengan demikian maka pemerintahan tidak menjadi otoriter dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dihasilkan merupakan representasi dari keinginan masyarakat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemerintah.

Rule of Law

Supremasi hukum merupakan langkah yang harus diambil untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek-praktek patologi dalam birokrasi. Dengan penegakan hukum yang baik maka indikasi untuk melakukan kesalahan akan terhapus karena para birokrat akan merasa takut dengan ancaman hukum.

Transparency

Melalui prinsip transparansi maka segala hal yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrat dapat dikontrol oleh masyarakat melalui informasi yang terbuka dan bebas diakses. Transparansi ini mendorong birokrasi untuk senantiasa menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang-undangan, Karena bila tidak sesuai masyarakat pasti mengetahui dan melakukan penuntutan.

Responsiveness

Paradigma baru birokrasi menekankan bahwa pemerintah harus dapat melayani kebutuhan masyarakat umum dan memberi respon terhadap tuntutan pembangunan. Patologi yang selama ini terjadi dimana pemerintah dilayani oleh masyarakat, maka dengan prinsip *responsiveness* pemerintah harus dapat memberikan pelayanan kepada *stakeholders*.

Effectiveness and Efficiency

Pemborosan yang terjadi dalam praktek pengelolaan organisasi Birokrasi dapat diminimalisir oleh prinsip ini, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Accountability

Melalui pertanggungjawaban kepada publik maka birokrasi menjadi hati-hati dalam bertindak, dengan akuntabilitas publik pemerintah harus memberikan keterangan yang tepat dan jelas tentang kinerja nya secara keseluruhan.

Strategic Vision

Melalui strategi Vi maka akan tumbuh dalam setiap birokrat akan nilai-nilai idealisme dan harapan-harapan organisasi dan negara untuk masa yang akan datang nilai-nilai dan harapan-harapan ini akan memberikan kesan praktek pelaksanaan pekerjaan birokrasi.

E. SIMPULAN

Pemerintah dan seluruh aparatur yang dikenal dengan birokrasi memiliki peranan yang cenderung dominan dalam menentukan kebijakan, sehingga birokrasi memiliki peran dalam menentukan proses administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam menjalankan

peranannya tersebut masih terjadi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perilaku para aparatur birokrasi, hambatan tersebut dalam birokrasi dinamakan sebagai patologi birokrasi. Birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut yang menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomenanya cenderung ke arah patronase, dimana timbulnya sebuah pola yang bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan atau yang disebut simbiosis mutualisme. Sehingga budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi, diantaranya:

1. Perlu adanya reformasi administrasi secara global
2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas
3. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi
4. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk mencegah patologi birokrasi seperti *participation, rule of law, responsiveness, transparency, accountability, strategic vision, effectiveness and efficiency*.

REFERENSI

- Agus. 2019. "Patologi birokrasi dan agenda strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service".
- Engkus, E. 2017. "Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, Fadjar T, Salamatul A, Nurmawan, Nanang S. 2020. "Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia, International Journal of Psychosocial Rehabilitation". Vol. 24, Issue 04.
- Engkus, E. 2012. "Implementasi Filosofi Pancamarga dalam Koordinasi Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan" (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bandung)., (7), 1-18.
- Hamirul. 2017. "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*". 7 (1), April 2017, 14-18.
- Ulhak, Z., Satriadin, A. 2017. "Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 14, No 3, hal 134146.
- Haryanto, A. T. 2007. "Upaya menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsive dan Akuntabel". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 7, No. 2, hal 160-171.
- Hadma, A. M, Za'ban, A, 2020, Upaya pemerintah daerah dalam mengurangi patologi birokrasi (STudi disdukcapil kab Buton), *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, No 1.
- Sholehah, N. L, Ishaq, P. 2019. "Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa". *Gorontalo Accounting Journal*, Vol 4 (2), 2021 Page 133 – 145.
- Rosidah. 2005. "Patologi birokrasi dalam organisasi public dan upaya pencegahannya, Informasi". Vol 31, No 1.
- Hasyem, M, Ferizaldi. 2020. "Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi, *Jurnal Sosiologi USK*". Vol 14, No 2.

- Hamirul, Ariyanto. M, and Elsyra, N. 2018. “Profesionalisme aparatur sipil negara dalam rangka mengatasi patologi pelayanan public”. *Jurnal Marketing*, Vol 2, No 2.
- Ma'ruf, M. 2010. “Patologi Birokrasi”. Diakses dari <http://eprints.ipdn.c.id> tanggal 25 Februari 2021.